

MANAJEMEN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017

**Franky Gilbert Nainggolan ^a, Daud Markus Liando ^b, Johny Peter
Lengkong ^c**

^a Program Tata Kelola Pemilu *Batch* II, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

^b Dosen S2 TKP Fisip, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

^c Dosen S2 TKP Fisip, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

e-mail: frankygilbert83@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu aspek penting bagi keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terletak pada keberhasilan penyelenggara pilkada dalam menyiapkan logistik pilkada di dalam suatu kegiatan manajemen logistik. Berjalannya kegiatan logistik tentu saja didukung oleh komponen-komponen yang ada dalam sistem logistik meliputi struktur fasilitas, transportasi, pengadaan persediaan, komunikasi, penanganan dan penyimpanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen distribusi logistik pilkada di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang fokus pada komponen-komponen sistem logistik. Hasil penelitian ini diperoleh struktur fasilitas dalam mendistribusikan logistik, mulai dari gudang KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kurangnya ketersediaan sarana transportasi di PPK dan PPS di daerah-daerah kepulauan, dan kurangnya ketersediaan gudang logistik yang *representative* di PPK. Transportasi yang digunakan adalah *truk*, *pickup*, kapal *pajeko* dan *pumpboat*, kurangnya ketersediaan moda transportasi yang handal untuk mendistribusikan logistik dipengaruhi kondisi cuaca, dan kapal-kapal digunakan oleh pihak lain untuk kampanye, menyebabkan keterlambatan pendistribusian. Pengadaan persediaan dilakukan melalui *e-tendering/e-katalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan pengadaan langsung, beberapa item logistik yang pengadaannya terlambat, ada beberapa item logistik yang tidak lengkap halaman dan jumlahnya, dan kedatangan logistik dari penyedia tidak bersamaan menyebabkan pengepakan dan penyimpanan logistik menjadi terlambat pada akhirnya menyebabkan terlambatnya jadwal distribusi. Tidak tersedianya logistik pengaman sebagai cadangan juga menyebabkan ketidakpastian sistem logistik yang menyebabkan terlambatnya pendistribusian logistik. Kurangnya komunikasi menyebabkan moda transportasi tidak tersedia dan terlambatnya pengadaan persediaan yang akhirnya terlambatnya pendistribusian logistik. Penanganan dan penyimpanan logistik dilakukan dari menerima, menyortir, melipat kertas suara, mengeset formulir, dan mengepak logistik kedalam kotak suara, ada beberapa item logistik yang pengadaannya terlambat, menyebabkan terlambatnya kegiatan pengepakan akhirnya menyebabkan jadwal pendistribusian logistik terlambat.

Kata Kunci: Manajemen, Distribusi, Logistik

**LOGISTIC DISTRIBUTION MANAGEMENT OF REGENT
AND DEPUTY REGENT ELECTION AT ELECTION COMMISSION OF SANGIHE
ISLANDS REGENCY IN 2017**

ABSTRACT

One important aspect of Regional Head Election (Pilkada's) success lies in the success of Pilkada organizers in preparing Pilkada logistics in a logistics management activity. Logistics activities are supported by components in logistics system including facility structure, transportation, procurement, communication, handling and storage. This study aims to determine and analyze the management of logistics distribution Pilkada Sangihe in 2017. This study uses qualitative methods that focus on the components of logistics systems. The results of this study obtained the structure of facilities in distributing logistics, ranging from warehouse of the Sangihe Islands Regency Election Commission distributed to Sub District Election Committee (PPK), Voting Committee (PPS) and Voting Organizers Group (KPPS), lack of transportation facilities availability of PPK and PPS in archipelago areas, and lack of logistics warehouses availability that are representative in PPK. Transportation used is truck, pickup, pajeko and pumpboat. Lack of reliable transportation mode to distribute logistics influenced by weather conditions, and ships are used by other parties for campaign, causing delays in logistic distribution. The procurement of inventory is conducted by e-tendering / e-catalog of Government Services Procurement Policy Agency (LKPP) and direct procurement. Some logistics items procurement are held lately, some logistic items are incomplete amount and pages, and the logistics from the provider does not arrival simultaneously causing the packing and the storage of logistic handling lately, this cause ultimately led to a delayed distribution schedule. The unavailability of safety logistics as a reserve also leads to the uncertainty of the logistics system leading to delays in logistic distribution. Lack of communication causes unavailable transportation modes and late procurement of supplies that cause ultimately delay the distribution of logistics. Logistic handling and storage is conducted by receiving, sorting, folding ballot paper, setting up forms, and packing logistics into the ballot, some logistics items are delayed, causing late packing activities eventually leading to the late logistics distribution schedules.

Keywords: Management, Distribution, Logistics

PENDAHULUAN

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan Pilkada, terletak pada keberhasilan penyelenggara dalam menyiapkan sarana dan prasarana Pilkada berupa logistik atau perlengkapan penyelenggaraan di dalam suatu kegiatan manajemen logistik yang efektif dan efisien. Logistik bukan hanya pelengkap dalam proses Pilkada, melainkan syarat mutlak terselenggaranya Pilkada yang demokratis. Banyak hal yang bisa menjadi sumber masalah berasal dari logistik. Dari hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu terdapat banyak kendala dalam manajemen logistik terutama pengadaan dan pendistribusian logistik di beberapa daerah.

Kesulitan yang sama juga masih dihadapi KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017 lalu, terjadi keterlambatan pendistribusian logistik di Kecamatan Nusa Tabukan sebanyak 9 TPS, logistik baru bisa terdistribusi di hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017, KPU Kabupaten Kepulauan

Sangihe membuat keputusan untuk menunda pemungutan suara di 9 TPS tersebut. Pemungutan suara susulan ini tidak sesuai lagi dengan standar Pilkada serentak. Dengan demikian, bahwa permasalahan logistik Pilkada ini menimbulkan banyak dampak pada berbagai proses Pilkada. Distribusi merupakan salah satu dari fungsi manajemen logistik. Dimana manajemen logistik Pilkada memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada. Guna memenuhi logistik Pilkada ke seluruh PPK, PPS, dan TPS di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara tepat jumlah; tepat jenis; tepat sasaran; tepat waktu; tepat kualitas; dan efisien maka diperlukan manajemen distribusi logistik Pilkada yang baik.

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang dijadikan landasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen distribusi logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017.

Logistik merupakan proses pengelolaan yang penting terhadap pemindahan dan penyimpanan barang dari penyuplai kepada perindustrian dan kepada konsumen. Manajemen Logistik adalah merupakan satu aktivitas perindustrian yang tertua tetapi juga yang termuda. Aktivitas logistik (lokasi fasilitas, transportasi, inventarisasi, komunikasi, dan pengurusan dan penyimpanan) sudah dilakukan orang semenjak awal spesialisasi komersil (Bowersox, 2002:13).

Menurut Kusumastuti (2014:5-9) dalam perkembangannya terdapat berbagai peranan manajemen logistik diantaranya sebagai berikut: (1) Peranan logistik dalam organisasi publik, yang sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses ini tidak hanya di sekitar aktivitas pengadaan barang untuk kebutuhan pemerintah, tetapi juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, seperti pemberian pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. (2) Peranan logistik dalam mendukung kegiatan pemasaran, karena harus mengintegrasikan gagasan-gagasan untuk memperoleh produk yang cepat, pada saat yang tepat, promosi yang memadai, dan tempat yang memadai. Logistik mendukung pengiriman barang pada saat dan di mana produk tersebut dibutuhkan. (3) Peranan logistik dalam ekonomi, yaitu: logistik merupakan pengeluaran utama dalam bisnis, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi lainnya, logistik mendukung pergerakan dan aliran dari sejumlah transaksi ekonomi, logistik menambah nilai dengan menciptakan kegunaan (*utilitas*) waktu dan tempat, dalam perdagangan internasional pemerintah ikut memerankan kebijakan maupun pengawasan perdagangan karena merupakan perluasan kegiatan ekonomi dan (4) Peranan logistik dalam militer, begitu pentingnya kontribusi logistik terhadap kemenangan sekutu di Perang Dunia Kedua keberhasilan pasokan, pendistribusian, dan penyimpanan merupakan keberhasilan Pasukan Militer.

Untuk mencapai tujuan logistik perusahaan atau organisasi membutuhkan fungsi-fungsi logistik guna mencapai misi logistiknya. Fungsi manajemen logistik adakah suatu proses yang berkelanjutan dan

saling berhubungan satu sama lainnya serta saling mendukung satu sama dan lainnya. Proses manajemen logistik menurut Subagya (1996:10) terdiri dari: (1) Fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan. Perencanaan mencakup kegiatan dalam menetapkan sasaran-sasaran, pedoman-pedoman, pengukuran penyelenggaraan bidang logistik. Penentuan kebutuhan merupakan perincian (*detailing*) dari fungsi perencanaan. (2) Fungsi penganggaran, yaitu kegiatan dan usaha-usaha untuk menetapkan secara rinci penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar. (3) Fungsi pengadaan, merupakan kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku, menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. (4) Fungsi penyimpanan dan penyaluran, merupakan pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran perlengkapan yang telah diadakan untuk kemudian disalurkan kepada instansi-instansi pelaksana. (5) Fungsi pemeliharaan, merupakan usaha atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna dan daya hasil barang. (6) Fungsi penghapusan, merupakan kegiatan dan usaha membebaskan barang dari pertanggungjawaban. (7) Fungsi pengendalian, merupakan fungsi untuk mengawasi dan mengamankan keseluruhan pengelolaan logistik. Fungsi-fungsi tersebut diatas pada dasarnya merupakan siklus kegiatan yang satu sama lain saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, secara umum disebut siklus logistik.

Proses manajemen logistik pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat didalamnya, yaitu: lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi logistik (*channel of distribution*) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*). Manajemen logistik terpadu merupakan konsep berbeda dalam manajemen logistik, yang mengintegrasikan sistem-sistem manajemen distribusi fisik dan manajemen material. Konsep logistik terpadu itu sendiri terdiri dari dua usaha yang berkaitan yaitu operasi logistik dan koordinasi logistik (Bowersox, 2002:24).

Sistem ini mengulas mengenai bagaimana suatu material diproses, manufaktur, disimpan, diseleksi, untuk kemudian dijual atau dikonsumsi. Pembahasan dalam sistem logistik ini merupakan pembahasan yang komperhensif, termasuk pembahasan mengenai proses manufaktur dan perakitan, pergudangan, pendistribusian, titik/poin pengalihan angkutan, terminal transportasi, penjualan eceran, pusat penyortiran barang dan dokumen, pusat penghancuran, dan pembuangan dari keseluruhan kegiatan industri (Ghiani dkk, 2004:1). Berjalannya kegiatan logistik tentu saja didukung oleh komponen-komponen yang ada dalam sistem logistik tersebut. Menurut Bowersox (2002:63) ada 5 (lima) komponen yang bergabung untuk membentuk sistem logistik, komponen-komponen yang antara lain terdiri dari: struktur fasilitas, transportasi, pengadaan, persediaan, komunikasi, penanganan dan penyimpanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang dipakai untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015:1). Lokasi penelitian dilakukan di KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pelaksana pendistribusian logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017.

Fokus utama penelitian ini adalah manajemen distribusi logistik pada KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017 untuk memenuhi penyediaan logistik secara tepat jumlah; tepat jenis; tepat sasaran; tepat waktu; tepat kualitas; dan efisien.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data-data primer tersebut, yaitu dokumen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017, antara lain: dokumen kebijakan tentang tahapan, dokumen kebijakan tentang pengadaan kebutuhan dan pendistribusian logistik, dokumen kebijakan tentang jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), dokumen kebijakan tentang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta dokumen-dokumen lain yang terkait dalam penelitian ini. Waktu penelitian ini dilakukan dilakukan dari bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2018.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Logistik terpadu ini mengintegrasikan saluran distribusi dengan manajemen distribusi fisik kedalam suatu sistem logistik. Berjalannya kegiatan dan usaha logistik tentu saja sudah didukung oleh komponen-komponen yang terdapat didalam sistem logistik tersebut. Pertimbangan dalam salah satu fungsi logistik akan berakibat pada fungsi logistik lainnya, inilah yang membuat keberhasilan manajemen logistik terpadu yang sifatnya saling terkait. Menurut Bowersox (2002:63) ada 5 (lima) gabungan komponen untuk membentuk suatu sistem logistik, komponen-komponen yang antara lain terdiri dari: Struktur fasilitas, Transportasi, Pengadaan persediaan, Komunikasi, Penanganan dan penyimpanan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui deskripsi objek penelitian dan karakteristik informan, serta hasil wawancara dengan informan. Peneliti akan membahas penelitian berdasarkan 5 (lima) komponen yang ada didalam sistem logistik, sebagai berikut:

Struktur Fasilitas

Jaringan fasilitas suatu organisasi dalam sistem logistik merupakan rangkaian tempat ke mana dan melalui mana material dan barang diangkut. Untuk tujuan perencanaan, fasilitas-fasilitas tersebut meliputi pabrik, gudang-gudang, dan distributor (Bowersox, 2002:64). Struktur jaringan fasilitas ini juga biasa disebut saluran distribusi, saluran

distribusi fisik adalah metode dan sarana dimana suatu barang atau berbagai barang dipindahkan secara fisik, atau didistribusikan, dari tempat produksi sampai pada tempat di mana barang tersebut tersedia bagi pengguna akhir (Rushton dkk, 2010:50).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan alur penerimaan dan pendistribusian logistik Pilkada melalui struktur fasilitas yang ditetapkan adalah untuk daerah daratan dimulai dari gudang KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian ke PPK, PPS dan KPPS. Untuk daerah kepulauan dari gudang KPU Kabupaten Sangihe langsung ke PPS atau KPPS, lalu logistik digunakan oleh KPPS dan pemilih pada hari pemungutan suara.

Dari penelitian ini didapatkan pemilihan saluran distribusi ini sudah cukup efektif, sesuai dengan pendapat Bowersox (2002:64), seleksi serangkaian tempat yang unggul (*superior*) bisa memberikan banyak keuntungan yang bersaing bagi organisasi. Tingkat ketepatan logistik yang bisa dicapai itu berkaitan langsung dengan dan dibatasi oleh jaringan fasilitas. Terlihat dari masing masing saluran distribusi yang dipilih KPU Kabupaten Sangihe dapat menjangkau wilayah geografisnya masing-masing, PPK yang berada di Kecamatan dapat menjangkau desa-desa disetiap wilayah kerja PPK tersebut berada, kemudian PPS yang berada di Desa/ Kelurahan menjangkau setiap lokasi TPS di wilayah kerja PPS tersebut, dan KPPS sebagai pengguna logistik dapat mendistribusikan logistik kepada pemilih sebagai pengguna akhir.

Dari keterangan informan dan data-data hasil penelitian didapati permasalahan yang terjadi pada fasilitas saluran distribusi logistik Pilkada Sangihe tahun 2017 adalah ketersediaan moda transportasi di PPK dan PPS. Dilihat dari kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan wilayah kepulauan, dari 15 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe 7 Kecamatan merupakan daerah yang terdiri dari pulau-pulau diantaranya Kecamatan Marore, Kecamatan Tatoareng, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Mangintau Selatan, dan Kecamatan Kendahe, penyaluran logistik dari gudang KPU Kabupaten Sangihe yang berada di Tahuna ke kecamatan-kecamatan tersebut hanya bisa dilakukan menggunakan transportasi laut yaitu kapal Pajeko/ angkutan rakyat atau pumpboat dimana transportasi laut ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca.

Selain ketersediaan moda transportasi struktur fasilitas juga harus didukung fasilitas gudang, baik itu untuk penanganan dan penyimpanan logistik. Dari hasil pengamatan dan wawancara gudang distribusi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sangihe sudah cukup *representative* untuk melakukan operasi logistik seperti penyortiran, pengesetan formulir dan pengepakan, namun untuk di PPK menurut keterangan informan masih kurang memadai untuk ketersediaan gudang di PPK, PPK harus bekerja sama dengan pihak-pihak seperti Pemda dan Kepolisian untuk tempat penyimpanannya, gudang logistik ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan logistik, terlebih lagi dalam proses setelah pemungutan suara dimana rekapitulasi suara dilakukan di tingkat PPK, jadi seluruh logistik dari KPPS

untuk wilayah kecamatan itu disimpan di gudang PPK sampai dengan rekapitulasi di tingkat PPK selesai, jadi sangat dibutuhkan gudang penyimpanan yang memadai.

Struktur fasilitas dalam sistem logistik adalah suatu kegiatan awal yang patut dilakukan sebelum KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai mendistribusikan logistik. Penentuan fasilitas logistik yang tepat akan mempengaruhi kemampuan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melayani masyarakat sebagai pemilih untuk mendapatkan logistik yang tepat. Kesalahan dalam pemilihan struktur fasilitas saluran logistik akan berakibat pada biaya transportasi yang tinggi, kurangnya tenaga kerja, tidak tersedianya persediaan logistik yang cukup, dan lain sebagainya.

Komponen sistem logistik yang salah satunya struktur fasilitas adalah kunci bagi keberhasilan manajemen logistik. Pemenuhan pesanan logistik Pilkada secara tepat adalah bagian penting dari manajemen logistik Pilkada dan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu untuk membuat keputusan strategis pada jaringan logistik. Menurut penelitian Candra (2013) desain dan operasi jaringan pada logistik memiliki pengaruh yang berarti terhadap sistem logistik. Ketetapan penting yang dibutuhkan adalah moda transportasi yang dipakai dan gudang pusat distribusi yang digunakan.

Transportasi

Transportasi adalah pindahnya barang atau penumpang dari tempat yang satu ketempat yang lain, dimana barang dipindahkan ke tempat tujuan yang membutuhkan. Secara umum transportasi adalah suatu aktivitas memindahkan sesuatu barang dan/atau orang dari tempat yang satu ketempat yang lain, baik dengan atau tanpa sarana. (Bowersox, 2002:157). Menurut Kamaluddin (2003: 18-19) transportasi maka dapat dibedakan beberapa moda transportasi berdasarkan unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut: transportasi darat, transportasi air dan transportasi udara.

Sebelum menentukan moda transportasi yang digunakan untuk mengangkut logistik, KPU Kabupaten Sangihe terlebih dahulu membuat perencanaan pendistribusian logistik dengan memetakan wilayah dengan menetapkan daerah prioritas, menetapkan jadwal pendistribusian, dan menetapkan moda transportasi yang akan digunakan. Skala prioritas yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah terdiri dari tiga prioritas, yang dibagi kedalam dua wilayah, yaitu daratan dan kepulauan. Seluruh wilayah kepulauan masuk kedalam prioritas utama pendistribusian, sedangkan untuk wilayah daratan merupakan prioritas sedang dan biasa. Jadwal distribusi dibagi kedalam dua bagian, yaitu untuk wilayah daratan dimulai dari tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan 14 Februari 2017 dan wilayah kepulauan mulai dari tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan 14 Februari 2017. Moda transportasi yang digunakan dalam melaksanakan pengangkutan dan pengiriman logistik ke PPK, PPS, dan KPPS yaitu: *truck/pickup* untuk wilayah daratan dan kapal *pajeko/pumpboat* untuk wilayah kepulauan.

Dari hasil penelitian didapati terjadi penundaan pemungutan suara ke Kecamatan Nusa Tabukan yang seharusnya dilakukan serentak tanggal 15 Februari 2017 namun baru dapat dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2017, di Kecamatan ini terdapat 9 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 2.491 jiwa. Penundaan pelaksanaan pemungutan suara di Kecamatan Nusa Tabukan dikarenakan terjadi keterlambatan pendistribusian logistik, logistik baru sampai di Nusa Tabukan pada tanggal 15 Februari 2017 pada pukul 13.00 Wita. Keterlambatan ini disebabkan moda transportasi yang digunakan adalah kapal pajeko/angkutan rakyat, moda transportasi ini tidak cukup andal untuk mengangkut logistik ke Kecamatan Nusa Tabukan disebabkan karena kondisi cuaca ekstrim dan gelombang laut yang tinggi, moda transportasi kapal pajeko ini tidak cukup andal untuk mendistribusikan logistik ke Kecamatan Nusa Tabukan. Selain karena kurangnya ketersediaan sarana transportasi yang andal dan konsisten, penelitian ini juga menemukan keterlambatan pendistribusian logistik ini juga disebabkan oleh tidak tepatnya penentuan rute transportasi.

Kecamatan Kendahe (khusus wilayah kepulauan), Kecamatan Marore, dan Kecamatan Nusa Tabukan merupakan daerah prioritas utama seharusnya untuk daerah-daerah prioritas pendistribusian dilakukan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan ketersediaan, keandalan dan konsistensi moda transportasi yang digunakan, untuk Kecamatan Kendahe, Kecamatan Marore dan Nusa Tabukan pengangkutan bisa dilakukan menggunakan dua kapal pajeko, untuk kecamatan Kendahe dan Kecamatan Marore dapat menggunakan satu kapal pajeko karena merupakan satu rute pendistribusian, untuk menuju Kecamatan Marore terlebih dahulu melalui Kecamatan Kendahe melalui Pelabuhan Tahuna dan satu lagi untuk Kecamatan Nusa Tabukan menggunakan satu kapal pajeko, pendistribusian dapat dilakukan mulai dari gudang KPU Kabupaten Sangihe menuju Pelabuhan Petta menggunakan kendaraan *truck/pickup* dan selanjutnya menggunakan kapal *pajeko/pumpboat* menuju Kecamatan Nusa Tabukan. Dari penelitian ini didapatkan bahwa keterlambatan logistik disebabkan minimnya ketersediaan sarana transportasi yang cepat, handal, dan sanggup untuk mendistribusikan logistik Pilkada tepat waktu dipengaruhi oleh kondisi cuaca, serta penentuan rute transportasi yang tidak tepat menyebabkan keterlambatan pendistribusian logistik.

Pengadaan Persediaan

Salah satu fungsi manajemen logistik adalah pengadaan, fungsi pengadaan merupakan kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku, menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada (Subagya, 1996:10). Tingkat persediaan menggambarkan keputusan distribusi fisik lain yang mempengaruhi kepuasan pengguna logistik. Organisasi menginginkan persediaan barang yang cukup guna memenuhi semua kebutuhan masyarakat dengan segera (Kotler, 1993:295).

Dari hasil dan data-data penelitian yang didapat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pengadaan persediaan logistik melalui dua cara yaitu menggunakan *e-purchasing/e-katalog* LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan menggunakan metode pengadaan langsung. Pengadaan surat suara, tinta, segel dan hologram dilakukan melalui *e-purchasing/e-katalog* yang penyediannya ada di Pulau Jawa. Pengadaan sampul, formulir, *sticker*, *broiler* dan alat kelengkapan TPS diadakan dengan metode pengadaan langsung dari penyedia di Manado.

Dari hasil penelitian ditemukan pengadaan logistik Pilkada yang dilakukan terdapat kelebihan dan kekurangannya dari pengadaan yang dilakukan melalui *e-purchasing/e-katalog* LKPP proses pengadaan dan pendistribusian berjalan dengan baik dan cukup dapat menghemat anggaran logistik karena pengadaan melalui *e-purchasing/e-katalog* LKPP harganya lebih murah dan pendistribusiannya tepat waktu. Sedangkan pengadaan persediaan yang dilakukan melalui pengadaan langsung dari penyedia yang berada di Manado terdapat beberapa permasalahan diantaranya: masih ada beberapa jenis logistik yang terlambat kedatangannya sehingga membutuhkan waktu untuk menyortir pada akhirnya waktu untuk mendistribusikan barang menjadi tertunda, menjadikan barang tertumpuk serta tumpang tindih dengan barang yang baru datang. Barang yang menggunakan basis hitungan satuan lembar masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dari jumlah isi maupun lembar atau tidak tercetaknya beberapa halaman, sehingga proses pemilahan dan penyortiran terganggu menunggu kedatangan penggantian dan penambahan kekurangan tersebut. Dalam sistem logistik setiap komponen-komponen yang ada didalamnya saling mempengaruhi, jadi keterlambatan pengadaan persediaan akan menghambat sistem logistik lainnya yang pada akhirnya akan mengakibatkan sistem logistik berjalan dengan tidak baik.

Selain pengadaan persediaan logistik yang sesuai kebutuhan diperlukan juga persediaan cadangan sebagai pengaman untuk mengendalikan ketidak pastian dalam sistem logistik. Persediaan pengaman adalah pengadaan persediaan tambahan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan atau barang/*stock out* (Rangkuti, 2004:2). Dari hasil penelitian ini KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak menyediakan persediaan pengaman untuk setiap item logistik, persediaan pengaman yang disediakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya untuk kertas suara, kertas suara disediakan untuk mengantisipasi jika terjadi kekurangan logistik pada saat pemungutan suara di TPS dan untuk persediaan pemungutan suara ulang.

Tidak disiapkannya logistik sebagai cadangan untuk mengamankan ketidakpastian kegiatan logistik sangatlah beresiko, terlebih lagi ketika KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe diperhadapkan pada pelayanan publik, dimana ketersediaan logistik adalah salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Pilkada, karena melalui logistik hak politik masyarakat disalurkan. Seperti yang terjadi di Nusa Tabukan seharusnya hal ini dapat di antisipasi dengan mendistribusikan logistik cadangan yang disediakan,

ketidaktersediaan logistik cadangan menyebabkan ketidakpastian dalam sistem logistik dalam hal ini adalah terlambatnya pendistribusian logistik ke Kecamatan Nusa Tabukan

Dari penelitian ini didapatkan bahwa keterlambatan pengadaan logistik, kedatangan logistik tidak bersamaan, dan terdapat beberapa jenis logistik yang kurang lengkap serta tidak adanya persediaan cadangan sebagai pengaman menyebabkan sistem logistik berjalan dengan tidak baik. Menurut penelitian Candra (2013) ketersediaan logistik memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem logistik. Dalam sistem logistik menyimpan banyak barang pasti akan memperbesar biaya, sedangkan jika tidak ada persediaan akan sangat berisiko apabila ada PPK, PPS, dan KPPS memerlukan logistik namun tidak tersedia, tentunya pemilih dapat mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Ini berarti akan mengurangi kesuksesan penyelenggaraan Pilkada itu sendiri dan kinerja KPU akan dipertanyakan profesionalitasnya.

Komunikasi

Ada 2 (dua) tugas manajerial yang berkaitan langsung dengan komunikasi logistik. Yang pertama adalah pengolahan pesanan dan yang kedua adalah pengawasan pesanan. Pengolahan pesanan adalah suatu arus komunikasi yang kritis yang merupakan masukan utama (*prime out*) bagi sistem logistik. Pengawasan yang penting dilakukan dalam distribusi logistik Pilkada adalah dengan melakukan pengendalian logistik. Salah satu fungsi manajemen logistik adalah pengendalian, pengendalian merupakan fungsi untuk mengawasi dan mengamankan keseluruhan pengelolaan logistik. (Subagya, 1996:10). Dalam kaitannya dengan logistik Pilkada hal-hal yang perlu di awasi dan dikendalikan adalah struktur fasilitas saluran distribusi logistik, yaitu PPK, PPS dan KPPS, sarana moda transportasi pengangkutan logistik, pengadaan persediaan logistik dan penanganan penyimpanan, serta keamanan pendistribusiannya.

Dari penelitian ini ditemukan kurangnya upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sangihe untuk mengendalikan penyediaan sarana transportasi dalam mendistribusikan logistik ke wilayah kepulauan hal ini terlihat dari terjadinya keterlambatan pendistribusian logistik ke kecamatan Nusa Tabukan disebabkan tidak tersedianya moda transportasi untuk mengangkut logistik, dan juga kesalahan dalam menetapkan rute transportasinya. Permasalahan tersebut diatas terlihat bahwa komunikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan pihak penyedia moda transportasi sangatlah kurang, seharusnya KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah mengkomunikasikan jadwal pendistribusian dengan pihak penyedia transportasi dengan membuat perjanjian bahwa moda transportasi yang telah disepakati tidak boleh digunakan oleh pihak lain selama jadwal pendistribusian logistik dilakukan.

Dari penelitian ini juga di dapatkan bahwa kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam upaya koordinasi untuk mengantisipasi kekurangan moda transportasi. KPU Kabupaten Sangihe dapat meminta

mengsiagakan moda transportasi yang handal seperti kapal laut kepada Pemda, Kapal Perang (KRI) dan atau helikopter kepada TNI sekaligus menyiapkan sarana pendukungnya (bahan bakar, dan lainnya), jadi ketika ada permasalahan yang timbul langsung dapat segera diantisipasi, terlebih lagi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan daerah kepulauan yang rentan akan gangguan cuaca, dan dalam keadaan sangat mendesak pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman dapat dilakukan melalui jalur angkutan udara/angkutan tercepat.

Selanjutnya dalam manajemen logistik pengendalian juga perlu dilakukan pada komponen-komponen dari sistem logistik yang lainnya, yaitu pengadaan persediaan, penanganan dan penyimpanannya. Dari hasil penelitian terjadi permasalahan, yaitu keterlambatan pengadaan barang, kedatangan barang dari penyedia yang tidak bersamaan serta beberapa item barang yang tidak lengkap jumlahnya, permasalahan ini menyebabkan penanganan barang (pensortiran, pengesetan dan pengepakan) menjadi terhambat, dan pada akhirnya menyebabkan mundurnya jadwal pendistribusian logistik. Dari permasalahan diatas dapat di lihat pentingnya pengendalian dan koordinasi terkait pengadaan persediaan, karena seluruh komponen sistem logistik adalah satu kesatuan sistem, jika terjadi gangguan salah satu komponen sistem logistiknya akan mengganggu komponen sistem logistik yang lainnya. Komunikasi perlu dilakukan terhadap penyedia barang untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan proses produksi logistik, pengadaan persediaan logistik harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena logistik Pilkada dibatasi dengan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada, jadi ketepatan waktu pengadaan dan pendistribusian logistik adalah suatu keharusan.

Dari hasil penelitian ini didapati komunikasi adalah faktor penting dalam sistem logistik dimana komunikasi memberikan informasi di setiap saluran distribusi, peran manajemen KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pihak yang membutuhkan logistik sangat penting untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh komponen sistem logistik, hal ini sesuai dengan pendapat Bowersox (2002) bahwa informasi yang tidak tepat bisa menyebabkan gangguan terhadap kinerja sistem, dan keterlambatan pada arus komunikasi bisa memperbesar kesalahan itu sehingga mengakibatkan serangkaian gangguan dalam sistem tersebut karena perbaikan yang berlebihan dan perbikan yang kurang. Komunikasi membuat dinamisnya suatu sistem logistik. Mutu dan informasi yang tepat-waktu merupakan faktor penentu yang utama dari kestabilan sistem.

Penanganan dan Penyimpanan

Penanganan dan penyimpanan dalam arti luas, penanganan dan penyimpanan (*handling and storage*) ini meliputi pergerakan (*movement*), pengepakan, dan pengemasan (*containerization*). Penanganan material dalam sistem logistik itu berpusat pada dan sekitar gudang. Khususnya ada empat kegiatan gudang yang harus dilaksanakan: 1) Penerimaan, 2) pemindahan, 3) seleksi dan 4) pengiriman (Bowersox, 2002:275). Penanganan dan penyimpanan logistik Pilkada dilakukan untuk

mengidentifikasi kerusakan, kekurangan, maupun kelebihan barang dan jasa logistik sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dengan segera mencari solusi atas hal-hal tersebut.

Dari penelitian ini bahwa dalam penanganan dan penyimpanan logistik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah cukup baik, hal ini terlihat dari logistik yang masuk dalam kotak suara dan ada logistik yang diluar kotak suara dan dikemas tersendiri, KPU telah menetapkan satuan dasar atau standarisasi dalam penanganan logistik dengan memperhitungkan kerusakan dan keamanan logistik, kemudahan dalam menyimpan logistik serta kemudahan dalam memuat logistik kedalam sarana transportasi pengangkut logistik. Sedangkan untuk penyimpanannya sudah cukup memadai dengan didukung oleh kapasitas gudang yang *representative* untuk melakukan kegiatan penanganan dan penyimpanan logistik.

Dari penelitian ini didapatkan bahwa proses penanganan dan penyimpanan logistik Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe juga mengalami hambatan disebabkan oleh permasalahan pada kegiatan pengadaan persediaan logistik. Dimana telah dibahas sebelumnya pada pengadaan persediaan logistik, yaitu permasalahan pengadaan formulir yang dilakukan melalui pengadaan langsung dari penyedia yang berada di Manado terdapat beberapa halaman formulir yang tidak lengkap mengakibatkan memerlukan waktu untuk penanganannya, kemudian waktu kedatangannya juga tidak bersamaan menyebabkan proses pengepakan terjadi keterlambatan, karena untuk mengepak logistik baru bisa dilakukan ketika seluruh item logistik lengkap.

Jadwal pendistribusian juga menjadi terpengaruh akibat terlambatnya penanganan dan pengepakan logistik. Hal ini terlihat dari perencanaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana untuk wilayah prioritas utama, yaitu wilayah-wilayah kepulauan termasuk Kecamatan Nusa Tabukan, logistik akan didistribusikan mulai dari tanggal 05 Februari 2017, namun kenyataannya pendistribusian dilakukan pada tanggal 10 Februari 2017, terlambatnya pengepakan logistik ini mempengaruhi jadwal distribusi logistik. Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa suatu sistem logistik memerlukan keseimbangan dari keseluruhan komponen sistem logistik, disini terlihat dari permasalahan yang terjadi pada komponen pengadaan persediaan mempengaruhi proses penanganan dan penyimpanan logistik dan pada akhirnya akan mempengaruhi komponen sistem logistik yang lainnya, baik itu struktur fasilitas dan transportasi untuk itu komunikasi logistik di perlukan untuk mengendalikan serta mengawasi seluruh komponen sistem logistik.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa belum berjalan dengan baiknya manajemen logistik Pilkada Sangihe tahun 2017 disebabkan karena komponen-komponen dalam sistem logistik Pilkada belum berjalan dengan baik. Komponen-komponen dalam sistem logistik

merupakan keseluruhan komponen yang berkesinambungan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam suatu sistem logistik.

Struktur fasilitas saluran distribusi logistik Pilkada Sangihe Tahun 2017 adalah untuk daerah kepulauan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe langsung mendistribusikan logistik dari gudang logistik ke KPPS didampingi oleh PPK dan PPS, sedangkan untuk wilayah daratan dimulai dari KPU Kabupaten Sangihe ke PPK kemudian ke PPS, selanjutnya ke KPPS. Struktur fasilitas distribusi logistik yang dilakukan KPU Kabupaten Sangihe ini sudah cukup baik karena PPK, PPS dan KPPS dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan alur pendistribusian sudah memperhitungkan skala prioritas pendistribusian, yaitu kepulauan dan daratan. Permasalahan yang terjadi pada struktur fasilitas distribusi logistik Pilkada Sangihe 2017 adalah kurangnya ketersediaan sarana transportasi di PPK dan PPS terutama di daerah-daerah kepulauan, dan kurangnya ketersediaan gudang logistik yang representative di PPK. Permasalahan struktur fasilitas ini menyebabkan sistem logistiknya tidak berjalan dengan baik.

Transportasi yang digunakan dalam mendistribusikan logistik Pilkada Sangihe tahun 2017 adalah melalui darat menggunakan *truk* dan *pickup*, serta melalui air menggunakan kapal *pajeko* (angkutan rakyat) dan *pumpboat*. Dalam penelitian ini didapatkan permasalahan, yaitu kurangnya ketersediaan moda transportasi yang handal untuk mendistribusikan logistik, terutama untuk mendistribusikan logistik ke wilayah kepulauan dimana transportasinya sangat dipengaruhi kepada kondisi cuaca, selain itu kurangnya ketersediaan transportasi juga disebabkan kapal-kapal yang biasa digunakan untuk mendistribusikan logistik digunakan oleh pihak lain untuk kampanye, kurangnya ketersediaan moda transportasi ini menyebabkan tidak tepatnya penetapan rute transportasi yang pada akhirnya menyebabkan keterlambatan pendistribusian logistik ke Kecamatan Nusa Tabukan.

Pengadaan persediaan logistik Pilkada Sangihe Tahun 2017 dilakukan dengan metode *e-tendering/e-katalog* LKPP dan pengadaan langsung. Permasalahan yang terjadi dalam pengadaan persediaan logistik adalah ada beberapa item logistik yang pengadaannya terlambat, ada beberapa item logistik yang tidak lengkap halaman dan jumlahnya, dan kedatangan logistik dari penyedia tidak bersamaan menyebabkan sistem logistik tidak berjalan dengan baik. Permasalahan pada pengadaan persediaan ini menyebabkan kegiatan pengepakan dan penyimpanan logistik menjadi terlambat pada akhirnya menyebabkan terlambatnya jadwal distribusi, dalam logistik Pilkada pengepakan logistik kedalam kotak suara baru dapat dilakukan ketika seluruh item logistik sudah lengkap. Keterlambatan pengepakan logistik ini akhirnya menyebabkan penyaluran logistik tidak sesuai jadwal yang direncanakan.

Tidak tersedianya logistik pengaman sebagai cadangan juga menyebabkan ketidakpastian sistem logistik yang menyebabkan terlambatnya pendistribusian logistik Pilkada Sangihe Tahun 2017. Dalam sistem logistik, logistik pengaman sebagai persediaan cadangan diperlukan untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam sistem logistik. Terkait

keterlambatan logistik ke Nusa Tabukan seharusnya dapat diantisipasi dengan mendistribusikan logistik cadangan dengan menggunakan moda transportasi tercepat.

Komunikasi yang dilakukan dalam pendistribusian logistik Pilkada adalah terkait pengendalian dan koordinasi untuk mengawasi logistik. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sangihe kepada penyedia moda transportasi menyebabkan moda transportasi yang seharusnya digunakan untuk mendistribusikan logistik Pilkada digunakan oleh pihak lain, ketidaktersediaan moda transportasi tersebut menyebabkan terlambatnya pendistribusian logistik ke kecamatan Nusa Tabukan. Kurangnya pengendalian dan koordinasi terkait pengadaan persediaan juga menyebabkan beberapa item logistik yang pengadaannya tidak tepat waktu dan jumlah sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan penanganan logistik, serta kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sangihe kepada Pemda, TNI dan Polri untuk mengendalikan ketersediaan moda transportasi juga menyebabkan keterlambatan pendistribusian logistik, seharusnya komunikasi telah dilakukan dalam perencanaan pendistribusian logistik.

Penanganan dan penyimpanan logistik KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan kegiatan mulai dari menerima logistik dari pihak ketiga, kemudian dilakukan penyortiran, pelipatan kertas suara, pengesetan formulir, dan pengepakan logistik kedalam kotak suara, dan menyimpannya di gudang logistik sebelum diangkut menggunakan moda transportasi yang tersedia. Permasalahan yang terjadi dalam penanganan dan penyimpanan adalah ada beberapa item logistik yang pengadaannya terlambat, keterlambatan pendistribusian logistik dari penyedia. Hal ini menyebabkan terlambatnya kegiatan pengepakan logistik, karena pengepakan dilakukan harus menunggu logistik lengkap. Pada akhirnya menyebabkan jadwal pendistribusian logistik tidak sesuai dengan perencanaan.

Komponen sistem logistik adalah struktur fasilitas, transportasi, pengadaan persediaan, komunikasi serta penanganan dan penyimpanan. Keberhasilan manajemen logistik Pilkada merupakan bentuk perwujudan visi dan misi KPU untuk melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya melalui pengelolaan logistik sesuai dengan prinsip-prinsip logistik Pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan manajemen logistik dapat terwujud jika komponen-komponen dalam sistem logistik dapat berjalan dengan baik, komponen-komponen sistem logistik itu merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi, untuk itu dapat disarankan beberapa hal terkait komponen-komponen sistem logistik sebagai berikut:

1. Struktur Fasilitas. Dalam kegiatan perencanaan logistik untuk PPK yang tidak memiliki gudang penyimpanan yang *representative* sebaiknya di anggarkan biaya untuk menyewa gudang, karena pada proses pengembalian logistik gudang di PPK dibutuhkan sampai rekapitulasi suara selesai dilakukan, sebelum logistik di angkut ke gudang KPU Kabupaten.

2. Transportasi. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan daerah yang wilayah geografisnya adalah kepulauan. Kecepatan, keandalan kemampuan serta frekuensi moda transportasi yang tersedia untuk daerah ini sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Untuk itu KPU Kabupaten Sangihe sebaiknya menganggarkan dan merencanakan moda transportasi yang tepat dan andal dalam mendistribusi logistiknya. KPU Kabupaten Sangihe juga dapat menjalin kerja sama dengan TNI, Polri, Pemda maupun pihak terkait lainnya yang dapat menyediakan transportasi yang tepat dan andal untuk mendistribusikan logistik.
3. Pengadaan persediaan logistik dalam kaitannya dengan pengelolaan logistik Pilkada, sebaiknya untuk daerah-daerah yang geografisnya sulit seperti daerah kepulauan dan daerah-daerah pegunungan yang akses distribusinya sulit dilihat dari ketersediaan transportasi, akses jalan dan lain sebagainya serta kondisi cuaca yang berubah-ubah dapat di buat regulasi yang mengatur khusus, dimana persediaan logistik pengaman dapat diadakan secara lengkap setiap item logistiknya tidak hanya surat suara, karena untuk daerah-daerah ini tingkat ketidakpastian dalam distribusinya sangat tinggi, suatu distribusi logistik dapat menggunakan ketersediaan logistik pada tingkat yang tepat untuk meningkatkan *responsiveness*-nya serta untuk mendukung kebutuhan masyarakat terhadap logistik dari KPU, dimana logistik Pemilu merupakan sarana masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya.
4. Komunikasi kepada pihak-pihak terkait demi kelancaran pendistribusian logistik harus lebih ditingkatkan, komunikasi harus sudah dilakukan dalam perencanaan pendistribusian logistik, komunikasi yang dilakukan terkait struktur fasilitas, transportasi, pengadaan persediaan, penanganan dan penyimpanan serta keamanan pendistribusian logistik. Komunikasi dapat dilakukan kepada BMKG untuk perkiraan cuaca dan penjadwalan pendistribusian, kepada penyedia sarana transportasi terkait jadwal dan ketersediaan moda transportasi, kepada TNI, Polri dan Pemda untuk menyiapkan dan mengsiagakan moda transportasi serta sarana pendukungnya (bahan bakar dan lain sebagainya) seperti Kapal Pemda, kapal Perang/KRI, helikopter dan moda transportasi andal lainnya, yang dapat digunakan kapan saja untuk keadaan darurat.
5. Pengendalian pengadaan persediaan logistik harus lebih ditingkatkan terlebih dalam proses produksi, dipastikan logistik yang di produksi sesuai dengan jumlah yang ditentukan, kualitasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta pendistribusian dari penyedia ke gudang logistik harus tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslichati, Lilik., Prasetyo, Bambang dan Prasetya, Irawan. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Assauri, Sofjan. 2004. *Manajemen Produksi dan Operasi*, Edisi 4, Surabaya: BPFE.
- Bowersox, Donald J. 2002. *Manajemen Logistik, Integrasi Sistem Manajemen Distribusi Fisik dan Manajemen Manajerial*. Edisi 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bowersox, Donald J. Closs, David J. Cooper, M. Bixby. 2002. *Supply Chain Logistics Management*. Irwin: McGraw-Hill.
- Dwiantara, Lukas dan Sumarto, Rumsari Hadi. 2004. *Manajemen Logistik Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi*. Jakarta: Gramedia.
- Ghiani, Gianpaolo. Laporte, Gilbert. Musmanno, Roberto. 2013. *Introduction to Logistics Systems Planning and Control*. 2nd edition New York: John Wiley and Sons Ltd.
- Harrison, Lisa. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Heizer, Jay & Barry Render. 2009. *Manajemen Operasi*. Diterjemahkan oleh Chriswan Sungkono. Edisi Sembilan Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamaluddin. 2003. *Ekonomi Transportasi*,: Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kotler, Philip, 1997. *Manajemen Pemasaran*. Diterjemahkan Hendra Teguh, Dan Ronny A. Rusli. Jakarta: Prenhallindo.
- _____, 1993, *Marketing Essentials*. New Jersey: Prentice Hall Inc, Terjemahan Purwoko, Herujati. *Marketing*. Jakarta: Erlangga.
- KPU, 2017. *Penyelenggaraan Pilkada 2015 dan 2017*. Jakarta: KPU.
- Kusumastuti, Dyah, Sugiana, A. Gima dan Sudiarto, A. Edi, 2014. *Manajemen Logistik Organisasi Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- LP3ES, 2014. Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial. *Laporan Evaluasi Pemilu 2014*. Jakarta: LP3ES.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Rangkuti, Freddy. 2004. *Manajemen Persediaan*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- RI, Peraruran KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*.
- RI, Peraruran KPU 11 Tahun 2016 tentang *Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*.
- Rushton, Alan., Croucher, Phil, & Baker, Peter. 2010. *The Handbook of Logistics & Distribution Management*. Great Britain: Kogan Page Limited.

- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Stanton, William. J. 1984. *Fundamental of Marketing*, Tokyo: Mc.Graw-Hill Book. Terjemahan Sundaru, Sadu.1991. *Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga
- Subagya, M.S. 1996. *Manajemen Logistik*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sonta, FM. 2011. *Panduan Logistik Indonesia*, Jakarta: PPM Manejemen.
- Warman, John. 2012. *Manajemen pergudangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jurnal dan Penelitian Terdahulu

- Chandra, Afridel. 2013. *Analisis Kinerja Distribusi Logistik Pada Pasokan Barang Dari Pusat Distribusi Ke Gerai Indomaret di Kota Semarang*. Jurnal Institusional Repository. Hal. 15-24. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Fadli, Ainur Mansururi, 2014. *Efektifitas Distribusi Fisik dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus pada CV. Agrotama Gemilang Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 7 No. 1, Malang: Universitas Brawijaya.
- Perbrianti, 2015, *Manajemen Logistik Pada Gudang Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala*. E-Journal Katalogis Volume 3 Nomor 7 hal 127-138. Palu: Universitas Tadulako.
- Roni, Hamda dan Puspita, Syifa, 2014. *Pengaruh Distribusi Fisik Terhadap Kepuasan Customer Pada PT. Beton Elemenindo Perkasa*. Jurnal Indonesia Membangun Vol 13, No 1. Bandung: STIE INABA
- Sutanto, Michelle Ribka dan Sumarauw, Jacky S. B. 2014, *Evaluasi Kinerja Sistem Logistik Pada Perusahaan Vulkanisir UD. Sumber Ban, Tateli*. Jurnal EMBA Vol.2 No.3, Hal. 588-596, Manado: Universitas Sam Ratulangi.